

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Della Cahaya Kamila (2017) dengan judul penelitian “Determinan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan tingkat literasi keuangan terhadap pelaku UMKM perempuan di kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan alat analisis *regresi logistik*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa usia usaha, tingkat pendidikan dan akun rekening masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Sedangkan usia pelaku UMKM, jenis usaha, kategori usaha tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan pada Pelaku Umkm Perempuan Di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

Susie Suryani dan Surya Ramadhan (2017) Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru”. penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan cara memperoleh data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM adalah sedang (57,9%). Variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan

pelaku usaha adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Sedangkan perbedaan gender dan usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM.

Cynthia Nur Fitriana Ichwan (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Studi Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah Pada Wilayah Gerbangkertasusila”. Yang bertujuan untuk mengkaji tingkat literasi keuangan pada suatu daerah dan menguji adanya perbedaan pada tingkat literasi keuangan berdasarkan faktor demografi, oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel literasi keuangan, dan faktor demografi. Setelah mendapatkan hasil tingkat literasi keuangan pada responden, selanjutnya dibandingkan dengan faktor demografi yang diujikan yakni jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan dan lama usaha menggunakan uji T dan ANOVA. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan berdasarkan riwayat pendidikan, pengelola keuangan yang memiliki riwayat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik. Jenis kelamin, usia pengelola dan lama usaha tidak dapat dijadikan faktor pembeda pada literasi keuangan. Hasil tersebut juga dapat dikatakan bahwa riwayat pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan sedangkan jenis kelamin, usia pengelola dan lama usaha tidak mempengaruhi literasi keuangan.

Birawani Dwi Anggraeni (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan. Studi Kasus: Umkm Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi pemilik UMKM dalam mengelola keuangan usaha.

Dan mengetahui faktor literasi keuangan yang mempengaruhi pemilik usaha untuk mengelola keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengumpulan data responden melalui kuesioner tingkat literasi keuangan pada 12 pemilik usaha dilakukan pada bulan Agustus 2015. Berdasarkan tabel demografi maka mayoritas responden adalah pemilik usaha berjenis kelamin pria sebesar 75% dan sisanya adalah wanita. Tingkat pendidikan responden pada umumnya adalah S1 sebanyak 66% dari total responden dan selebihnya dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Untuk tingkat literasi keuangan dari responden menunjukkan hasil minimum 18.18% dan maksimum 90.91% dengan tingkat rata-rata 34.85%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi keuangan dari responden masih dibawah 60% atau masih tergolong rendah.

Nujmatul Laily (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola Keuangan”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Gender, Usia, Academic ability dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya variabel literasi keuangan yang memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan akan semakin bijak dalam pengambilan keputusan keuangan. Akan tetapi, penelitian tidak dapat membuktikan adanya pengaruh *gender*, usia, kemampuan akademis dan pengalaman kerja terhadap

literasi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang *literate* (paham dan mampu) dalam mengelola keuangan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
Della Cahaya Kamila (2017)	regresi logistik	Literasi Keuangan	usia usaha, pendidikan dan akun rekening	Pengalaman usaha
Susie Suryani dan Surya Ramadhan (2017)	Uji Beda	Literasi Keuangan	gender, usia, pendidikan, dan pendapatan	Usia usaha dan pengalaman usaha
Kurniawan dan Anies Indah Haryanti (2016)	regresi logistik	Sistem Akuntansi Formal (UMKM)	umur UMKM, ukuran UMKM dan manajemen keuangan	Pengalaman usaha
Cynthia Nur Fitriana Ichwan (2016)	Uji T dan Anova	Literasi Keuangan	pendidikan, pengelola keuangan, jenis kelamin, usia pengelola dan lama usaha	Pengalaman usaha
Birawani Dwi Anggraeni (2014)	regresi logistik	Pengelolaan Keuangan	pemilik usaha, pendidikan, dan literasi keuangan	Usia usaha dan Pengalaman usaha
Nujmatul Laily (2013)	Analisis Jalur Path	Literasi Keuangan	Gender, Usia, Academic ability dan Pengalaman Kerja	Usia usaha

Sumber : Berbagai jurnal yang dipublikasikan

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Literasi Keuangan

Secara sederhana literasi keuangan atau melek keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam hal mengaplikasikan keuangan (Mitchel, 2007). Widyawati (2012) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku. Upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK meliputi peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi (Permana, 2013). Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2013) sendiri menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup lebih sejahtera dimasa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan yakni guna melakukan edukasi atau pendidikan dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi dengan tawaran yang menguntungkan tinggi dalam jangka pendek tanpa ada pertimbangan resikonya.

Literasi keuangan erat kaitannya dengan manajemen keuangan dimana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka makin baik pula manajemen keuangan seseorang tersebut. Manajemen keuangan pribadi merupakan salah satu aplikasi dari konsep manajemen keuangan pada level

individu. Widayati (2012) mengatakan bahwa keputusan keuangan yang diambil oleh seorang individu meliputi berapa jumlah uang yang harus dikonsumsi tiap periode, apakah ada kelebihan dan bagaimana kelebihan tersebut diinvestasikan serta bagaimana mendanai investasi dan konsumsi. Lebih lanjut, Chinen dan Endo (2012) mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki masalah keuangan dimasa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginan.

2.2.1.1. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2013), literasi keuangan memiliki beberapa tujuan jangka panjang bagi seluruh masyarakat baik secara perseorangan maupun perusahaan. Kemudian tujuan pertama dari adanya literasi keuangan ini adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat dari sebelumnya yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan (Not Literate, 0,41%), menjadi (Well Literate, 21,84%) atau memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Kedua, literasi keuangan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Agus Sugianto menyatakan tujuan dari adanya literasi keuangan ini supaya masyarakat dan para

pelaku industri jasa keuangan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan. Chinen dan Endo (2012) mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan berdasarkan pengalaman usaha yang pernah dijalani dan tidak akan memiliki masalah keuangan dimasa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan usaha.

2.2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut Huston (2011) dalam penelitian Sri Lestari (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu:

1. Pengelolaan keuangan.
2. Pengetahuan investasi.
3. Perencanaan keuangan untuk menentukan tingkat keterampilan pengelolaan keuangan dalam hal anggaran, tabungan, dan tanggung jawab atas penggunaan kredit.

2.2.2. UMKM

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing usaha tersebut. Berdasarkan UU No.20 tahun 2008 UMKM memiliki beberapa kriteria. Pertama, usaha mikro yaitu usaha milik perorangan atau badan usaha milik orang dengan kekayaan bersih < 50 juta dan hasil penjualan < 300 juta. Kedua, usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan dengan kriteria kekayaan bersih 50-500 juta rupiah dan hasil penjualan 300

juta sampai 2,5 miliar rupiah. Ketiga, usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki dengan kriteria memiliki kekayaan bersih > 500 juta rupiah dan hasil penjualan 2,5 miliar rupiah – 50 miliar rupiah.

Usaha Mikro, berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana mestinya diatur dalam undang-undangan ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Sukirno (2004) Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu yang bermodal awal kecil atau terbatas, dan jumlah karyawan sedikit, nilai modal dan jumlah karyawan sesuai dengan penjelasan yang

diberikan oleh pemerintah. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

2.2.2.1. Tujuan UMKM

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan yang berkeadilan.

Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun perusahaan, perorangan, persekutuan, seperti halnya Firma dan CV maupun pereorangan terbatas. Dalam prespektif dunia telah diakui sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), akan tetapi juga di negara-negara maju (NMJ). Di Negara maju UMKM begitu penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti di negara sedang berkembang tetapi juga banyak kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar di bandingkan kontribusi dari usaha besar.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Ada kriteria Usaha Mikro menurut Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro antara lain:

1. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa entrepreneur yang memadai.
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2.3. Usia Usaha

Usia Usaha didefinisikan sebagai rentang waktu berdirinya usaha sejak start-up hingga saat sekarang yang diukur dengan satuan tahun. Usia Usaha adalah lamanya seseorang pengusaha atau pendangang dalam menjalankan usahanya. Semakin lama usia usaha maka semakin terlihat pula eksistensi usaha tersebut dan

menciptakan keyakinan pada pihak luar usaha dalam kualitas usahanya (Nugroho, 2012).

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri 2009). Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Wallace, *et al* 2009).

2.2.4. Pengalaman Usaha

Hogan *et al* (2012) mengatakan bahwa pengalaman kerja memiliki korelasi dengan literasi keuangan karena ketika seseorang bekerja maka pengetahuan serta kemampuannya akan mengalami peningkatan namun berbanding terbalik dengan prestasi akademiknya yang semakin menurun karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Ketrampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Asmie, 2008).

Foster (2001) mengungkapkan ada beberapa hal yang menentukan seseorang berpengalaman atau tidak dalam bekerja yaitu lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam lama usaha dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap bidang usahanya termasuk di dalamnya adalah dalam bidang keuangan.

2.2.5. Hubungan Antara Usia Usaha Terhadap Literasi Keuangan

Lama usaha diasumsikan bahwa semakin lama sebuah usaha berdiri, maka semakin tinggi tingkat literasi keuangan karena semakin lama usaha tersebut berdiri maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pelaku usahanya baik itu pengelolaan usaha maupun dalam manajemen keuangan perusahaannya baik dalam pengelolaan, maupun dalam pengambilan keputusan keuangan.

Lamanya suatu usaha berdiri menunjukkan bahwa manajemen keuangannya sudah berpengalaman dalam mengelola keuangan sehingga manajemen keuangannya bisa membedakan mana yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Wallace, *et al* 2009).

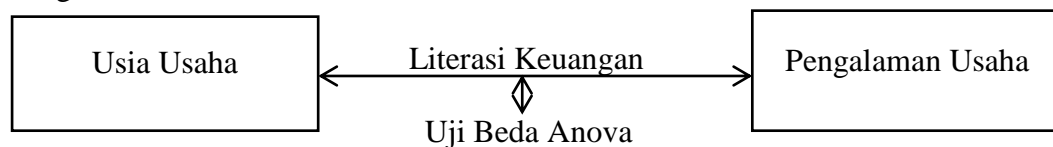
2.2.6. Hubungan Antara Pengalaman Usaha Terhadap Literasi Keuangan

Seseorang berpengalaman atau tidak dalam bekerja yaitu lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidangnya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Secara tidak langsung pengalaman usaha dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap bidang usahanya termasuk di dalamnya adalah dalam bidang keuangan. Shim *et al* (2009) yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengalaman bekerja dapat memperkuat pengetahuan finansial.

Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang literasi keuangannya. (Mortimer, 2006) pengalaman bekerja di luar rumah juga mendapatkan pelajaran finansial yang paling efektif, termasuk rasa tanggung jawab dan keahlian mengelola uang yang lebih baik. Chinen dan Endo (2012) mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan berdasarkan pengalaman usaha yang pernah dijalani dan tidak akan memiliki masalah keuangan dimasa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan usaha.

2.3. Kerangka Berfikir

Dalam keseluruhan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan permasalahan ditekankan pada Literasi Keuangan Usaha UMKM Ditinjau Dari Usia Usaha Dan Pengalaman Usaha.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1 : Terdapat Perbedaan Literasi Keuangan berdasarkan Usia Usaha UMKM di Kecamatan Kebomas.
2. H2 : Terdapat Perbedaan Literasi Keuangan berdasarkan Pengalaman Usaha UMKM di Kecamatan Kebomas.